

BAB III

DINAMIKA KONFLIK KEKERASAN ISRAEL DI PALESTINA

Banyak aspek yang mempengaruhi konflik Israel dan Palestina, dari yang paling dasar seperti kepentingan politik untuk menguasai kontrol atas wilayah yang sama sampai dengan yang kompleks seperti aspek sejarah, agama, budaya, ekonomi dan sebagainya. Konflik telah terjadi sejak awal abad ke-20 di mana komunitas Yahudi di Palestina yang disebut Yishuv, memperoleh kemerdekaan Israel setelah melewati dua fase perang: pertama, perang sipil antara Israel dan rakyat Palestina; kedua, perang Israel dengan negara-negara Arab tetangganya. Setahun sejak kemerdekaannya, pada 1949 Israel bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan wilayah yang diakui dari hasil partisi gencatan senjata 1949.

Wilayah tersebut kemudian bertambah dengan Israel secara de facto menguasai batas paling timur Palestina yang direbut dari Perang 1948 sampai wilayah hasil okupasi di Perang Enam Hari 1967 yaitu Yerusalem Timur, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan dan Semenanjung Peninsula. Aneksasi atas Yerusalem Timur menjadi semakin sah setelah pemerintahan Menachem Begin menyetujui sebuah Undang-Undang Dasar di Knesset yang mendeklarasikan “United Jerusalem” sebagai ibukota abadi Israel. Namun kedutaan-kedutaan luar negeri tetap bertempat di Tel Aviv. Israel tidak pernah menganeksasi Tepi Barat, tetapi hampir setiap pemerintah Israel sejak 1967 secara langsung “berkontribusi dalam memperkuat, mengembangkan dan memperluas kegiatan pemukiman”, atau, secara tidak langsung mengizinkan konstruksi pemukiman dengan tidak menutupi atau mencegah prosesnya. Dari perspektif ideologi yang melandasi pemikiran para pemukim Yahudi, pemukiman mewakili hak rakyat Yahudi untuk tinggal di wilayah manapun di tanah Israel.

A. Dinamika Konflik Perang Arab Israel

Akar konflik Israel dan Palestina awalnya tidak terlepas dari peranan Theodore Herzl yang menggagas pemikiran mengenai konsep Zionisme. Herzl berupaya untuk menyatukan masyarakat Yahudi yang terdiaspora dan mengalami kesamaan nasib akibat penindasan oleh Kristen Barat. Sejak 1896, implementasi dari 35 pemikirannya diwujudkan dalam tulisan “Der Judenstaat” (Negara Yahudi) yang berdampak pada munculnya imigran Yahudi (alimah) yang datang dari berbagai negara ke satu wilayah tujuan, yaitu Palestina. Alimah tersebut semakin mendapat pengesahan setelah Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour, mengeluarkan Deklarasi Balfour di mana Inggris secara penuh mendukung *national home* bagi rakyat Yahudi di negara Palestina. Inggris juga mengakui dan turut mendanai *World Zionist Organization* yang didirikan oleh Herzl pada 1897, yang bertujuan untuk menciptakan entitas politik Yahudi dan akhirnya sebuah negara. Herzl juga mengesahkan bahwa tujuan Zionisme adalah untuk mendirikan rumah nasional bagi Orang-Orang Yahudi yang dijamin oleh hukum publik.¹

Semakin meningkatnya gelombang imigrasi para Yahudi, pembelian tanah dan pemukiman Yahudi, mengakibatkan masyarakat Arab Palestina terdesak, sehingga timbullah bentrokan antara masyarakat Yahudi dan Palestina. Penduduk asli Palestina khawatir dengan terus berlangsungnya aktivitas Yahudi tersebut maka tidak mustahil suatu negara Yahudi dapat berdiri di Palestina. Pada akhirnya Inggris sebagai pemegang mandat tidak mampu menyelesaikan persoalan imigrasi dan wilayah yang menjadi pemicu berlarutnya pertikaian Yahudi dan warga Palestina, sehingga Inggris menyerahkan masalah tersebut kepada PBB.

Pada 14 Mei 1948 para pemimpin Zionis akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan negara Israel. Peristiwa ini semakin mengesahkan impian Zionis, yaitu menciptakan

¹<http://www.merip.org/primer-palestine-israel-arab-israeli-conflict-new> Accessed 20 March 2018

negara bagi rakyat Yahudi. Kolonisasi dan ekspansi Yahudi semakin mengakar di wilayah Palestina, yang menggusur masyarakat Palestina secara identitas maupun hak atas wilayah. Diaspora yang dulu dirasakan oleh Yahudi kini juga dialami oleh Palestina. Setelah negara Israel berdiri, warga Palestina yang jumlahnya tidak seberapa dengan banyaknya kuantitas imigran Yahudi dihadapkan pada dua opsi, yaitu menjadi warga negara Israel atau hidup sebagai minoritas di negara Israel. Hidup sebagai minoritas di negara Israel adalah pilihan terbaik sekaligus menyengsarakan karena mau tidak mau warga Palestina harus memilih untuk mengungsi. Jutaan warga Palestina yang terusir secara perlahan-lahan dari otoritas wilayahnya, kemudian tersebar ke berbagai negara, khususnya di Yordania, Syria dan Lebanon, dan mayoritas berstatus sebagai pengungsi serta tinggal di kamp-kamp pengungsi hingga saat ini.

Ideologi Zionis tidak seotentik gagasan pendahulunya, Theodore Herzl. Salah satunya adalah mendirikan suatu negara tidaklah cukup bagi Israel. Tidak hanya Tepi Barat (yang diklaim Israel dengan nama Yudea dan Samaria secara biblikal), Sinai dan Dataran Tinggi Golan serta Jalur Gaza yang berhasil diokupasi oleh Israel dan angkatan militernya; Yerusalem yang ditentukan oleh PBB sebagai zona internasional juga berhasil ditaklukan serta diklaim sebagai ibukota abadi oleh Israel. Sementara di sisi lain, warga Arab Palestina juga menginginkan Yerusalem dan Tepi Barat sebagai ibukota bagi negara Palestina.²

Periode eskalasi konflik sejak 1948 hingga saat ini memberikan pengaruh bagi dinamika konflik, antara kolonisasi, perang dan negosiasi damai. Konflik Israel dan Palestina yang pada awalnya bermula dari tujuan untuk mendirikan national home bagi rakyat Yahudi, berkembang menjadi isu politik dan permainan kepentingan. Bahkan campur tangan PBB juga tidak kunjung memberikan resolusi

²http://aei.pitt.edu/1809/1/MEEM_WP01.pdf Accessed 20 March 2018

yang adil bagi rakyat Palestina. Sejak gencatan senjata pada perang Arab-Israel tahun 1949, Israel dan Arab Palestina menandatangani perjanjian gencatan senjata (armistice lines), yaitu negara yang diketahui sebagai negara Palestina harus dibagi dengan Israel mengontrol 77% dari keseluruhan wilayah dan Yordania menguasai Yerusalem Timur serta sebagian Tepi Barat. Sedangkan Mesir mengambil alih Jalur Gaza. Sementara bagi masyarakat Palestina, negara Palestina hasil partisi PBB 1947 tidak akan pernah menjadi milik mereka.

Nasib konflik Israel dan Palestina bergantung pada kebijakan elit kedua negara tersebut, terutama dari pihak elit Israel. Ideologi Zionisme yang dipertaruhkan dalam setiap pemerintahan elit di Israel diwarnai dengan kepentingan politik dan historis. Sejak awal dideklarasikan sebagai negara, Israel pertama kali diperintah oleh Partai Buruh (Miflegel Ha"avoda Ha-Israelit) dalam rentang waktu 1967-1977. Kelompok Buruh berasal dari golongan para pekerja Yahudi di Palestina dan termasuk para imigran Yahudi yang datang pada awal abad 20-an (Histadrut). Partai Buruh juga menerapkan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Jalur Gaza tetapi dengan menekankan pada konsep pertanian.

Partai Buruh termasuk partai yang moderat dan sekuler terutama menyangkut konflik dengan Arab Palestina serta masih dapat kompromi atas sengketa wilayah yang menjadi akar permasalahan konflik. Sedangkan Partai Likud berhasil memerintah Israel pada 1977 dan tidak memiliki kompromi atas apapun yang menjadi hak Palestina. Likud terbentuk dari Herut (Freedom) Party, yaitu partai yang terdiri dari organisasi Zionis pra kemerdekaan, seperti Betar Youth Movement dan ETZEL (National Military Organization) dan menjadi partai sayap kanan terbesar di Israel. Berasal dari para imigran Yahudi Eropa dan berimigrasi akibat tekanan dan kekejaman Nazi, Likud menjadi partai dengan sentimen rasis, terutama terhadap bangsa Arab di Palestina. Sama seperti Buruh, Partai Likud juga menerapkan pembangunan

pemukiman tetapi dengan konsep yang berbeda yaitu demi terwujudnya Eretz Yisrael (Israel Raya) bagi bangsa Yahudi.³

Adapun perkembangan positif dalam hubungan Israel dan Palestina, yaitu sejak dimulainya perundingan resmi yang dimediasi oleh Amerika Serikat tahun 1991 dalam Declaration of Principles on Palestinian Self-Rule in the Occupied Territories di Madrid. Selanjutnya perundingan damai antara Israel dan Palestina berjalan seiring dengan stagnasi konflik yang tidak menemui solusi yang tepat karena pihak Israel cenderung tidak berkomitmen untuk berdamai dengan Palestina. Situasi ini biasanya terjadi pada pemerintahan partai sayap kanan, namun tidak menutup kemungkinan terjadi stagnasi konflik di pemerintahan sayap kiri dan tengah.

Dengan latar belakang historis partai yang sarat dengan ideologi Zionis, Partai Likud selalu memiliki tendensi kuat untuk memperluas wilayah kekuasaan terutama dengan pembangunan pemukiman. Adanya kepentingan nasional yang kuat dari para elit Israel tersebut akan selalu menjadi penghalang bagi tercapainya kesepakatan damai dengan Palestina. Perundingan damai antara Israel dan Palestina hanyalah sebatas formalitas belaka, kedua pemimpin bertemu, menghadiri konferensi damai bahkan menandatangani perjanjian damai, akan tetapi apabila proses damai yang tidak menyeluruh ke sumber yang lebih intens (deep-rooted) maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kondisi hubungan Israel dan Palestina yang berpola konflik - perundingan damai-konflik dapat menjadi vicious circle yang tidak akan ada akhirnya.

Perang Enam Hari antara Arab dan Israel pada 5 Juni 1967 menjadi titik utama timbulnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina, yang dimulai mengenai permasalahan wilayah di mana Israel berhasil merebut Tepi Barat dari Yordania, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, serta Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur merupakan daerah kekuasaan Yordania di mana rakyat

³M. Hamdan Basyar, "Ganjaan Perdamaian Palestina dan Israel", <http://www.politik.lipi.go.id/tentang-p2p/division/international-political-studies/20-hamdan> Accessed 20 March 2018

Palestina mendapat kewarganegaraan dan hidup di wilayah tersebut. Sejak Perang Enam Hari Israel membentuk pemerintahan militer untuk mengatur penduduk Palestina di wilayah okupasi Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang pada kenyataannya mengekang hak-hak dasar rakyat Palestina. Selain itu, pemerintah Israel membangun ratusan rumah serta mengizinkan ratusan ribu rakyat Yahudi untuk pindah ke Tepi Barat dan Jalur Gaza, walaupun hal tersebut melanggar hukum internasional. Pada 1981, Israel mengesahkan wilayah jajahannya yaitu dengan menganeksasi Yerusalem Timur dan mengklaimnya sebagai “ibukota abadi” Israel, di sisi lain pihak Arab menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.

Oleh karena itu selama beberapa dekade sampai saat ini konflik Israel dan Palestina terus dipicu dengan masalah pemukiman Yahudi dan saling klaim wilayah, sedangkan wacana solusi dua Negara yang menjadi basis negosiasi damai antara Israel antara Palestina akan dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki komitmen untuk „perdamaian dan hidup berdampingan secara aman”. Selain itu, peran mediator dalam konteks ini adalah Amerika Serikat dan juga intervensi dari masyarakat internasional, sangat diperlukan untuk selalu menghidupkan upaya damai serta berkompetensi menyentuh aspek-aspek fundamental kedua pihak berkonflik, baik secara historis maupun psikologis. Upaya mediasi tersebut diharapkan dapat menjembatani konflik kedua belah pihak secara lebih kondusif, dengan kata lain apabila Amerika Serikat memiliki komitmen penuh menjadi fasilitator yang tegas. Akan tetapi pada kenyataannya, dengan perbedaan persepsi dan tidak adanya komitmen yang kuat antara pemerintah Israel dan Palestina terhadap upaya damai, ditambah dengan kurangnya komitmen dari pihak mediator, sehingga dapat dipastikan kondisi konflik tidak hanya meningkat, namun juga perundingan damai hanya berjalan di tempat.

B. Konflik Anti Perdamaian Periode Benjamin Netanyahu

Pada periode kedua Benjamin Netanyahu terpilih sebagai perdana menteri Israel, ia telah dihadapkan pada gagasan two state solution yang menjadi topik perundingan langsung dengan Palestina. Two state solution adalah solusi di mana negara Israel dengan jaminan keamanan seperti yang telah dikondisikan akan hidup berdampingan dengan negara Palestina merdeka (peaceful co-existence). Netanyahu sendiri bersedia melanjutkan perundingan damai dengan Palestina yang sempat vakum karena dibekukan oleh Mahmoud Abbas setelah penyerangan Israel terhadap Gaza dalam Operasi Cast Lead. Hal tersebut diuraikan Netanyahu dalam pidatonya di AIPAC Policy Conference, 4 Mei 2009 mengenai pendekatan yang akan diambil menyangkut hubungan dengan Palestina. Pendekatan tersebut disebut Triple-track dan mencakup:

1. Jalur politik, yaitu berfokus pada perundingan damai tanpa prasyarat dan tanpa penundaan.
2. Jalur keamanan, yaitu memperkuat „aparatus keamanan” Palestina.
3. Jalur ekonomi, yaitu Israel bersedia menyingkirkan segala hambatan demi kemajuan ekonomi Palestina.⁴

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Tony Blair mendukung tindakan Netanyahu dalam menghidupkan ekonomi Palestina yang sempat suram sejak Intifada kedua tahun 2000. Blair menyatakan setelah keamanan dan ekonomi dicapai maka Israel dan Palestina dapat menuju ke tingkat politik. Petinggi Otoritas Palestina menolak adanya kontribusi Netanyahu di Tepi Barat, sebab aktivitas ekonomi meningkat karena investasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Otoritas Palestina Salam Fayyad. Mahmoud Abbas bersikukuh bahwa upaya politik dapat dicapai apabila Israel terlebih dulu memutuskan masalah pemukiman Yahudi. Namun secara

⁴<https://www.aipac.org/~media/Publications/Policy%20and%20Politics/Speeches%20and%20Interviews/Speeches%20by%20Policymakers/2009/05/PMNetanyahuPC09.pdf> Accessed 21 March 2018

bersamaan ketika kebijakan „murah hati“ Netanyahu tersebut disampaikan, ia juga menyiratkan sifat defensif dengan poin-poin dari pandangannya mengenai kepentingan Israel yang secara tidak langsung berhubungan dengan Palestina, yaitu :

1. Perdamaian tidak akan terwujud tanpa keamanan. Apabila Israel tidak mengutamakan keamanan, maka tidak akan pernah ada keamanan bahkan perdamaian. Netanyahu sendiri menegaskan tidak akan pernah kompromi mengenai keamanan Israel.
2. Agar kesepakatan final perundingan damai tercapai, Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Palestina harus mengakui Israel sebagai sebuah negara bagi rakyat Yahudi.⁵

Pada 19 Mei 2009 untuk pertama kalinya Benjamin Netanyahu dan Barack Obama bertemu di Gedung Putih dan membahas perundingan damai. Dalam pembicaraan tersebut, Obama mendesak Netanyahu untuk menyetujui solusi dua negara dan menghentikan aktivitas pemukiman Yahudi baik di Tepi Barat maupun di Yerusalem. Netanyahu menanggapi permintaan Obama tersebut serta menyikapi upaya damai dengan Palestina yang diuraikan dalam pidato kontroversialnya di Bar Ilan, 14 Juni 2009. Sikap Netanyahu jelas bertentangan dengan gagasan two state solution, yang mengharuskan berdirinya negara Palestina, dengan menyatakan dua prinsip yang menjadi dasar kebijakannya ke depan dan berpengaruh terhadap kesepakatan damai, yaitu pertama recognition, adalah Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi; kedua demilitarization, adalah apabila negara Palestina terbentuk maka Israel berhak mengontrol angkatan militer Palestina baik udara, laut maupun darat.⁶

Selain itu Netanyahu bersedia mengakhiri konflik dengan Palestina dengan tanpa prasyarat dan tanpa penundaan.

⁵https://www.aipac.org/~media/Publications/Policy%20and%20Politics/Press/News%20Stories%20About%20AIPAC/2009/05/PC_09_Press_Coverage_Highlights.pdf Accessed 21 March 2018

⁶<https://www.timesofisrael.com/full-text-of-netanyahus-speech-at-bar-ilan/> Accessed 21 March 2018

Secara eksplisit dalam pidatonya, Netanyahu mengakui negara Palestina, “we do not want to rule over them, we do not want to govern their lives, we do not want to impose either our flag or our culture on them”,⁵⁰ namun pada hakikatnya ia menolak menyerahkan wilayah jajahan 1967 yang seharusnya menjadi wilayah berdirinya negara Palestina. Netanyahu terkesan menerapkan double-standard, di satu sisi ia menyetujui pembicaraan damai namun di sisi lain ia menawarkan prasyarat yang kontradiktif dengan kepentingan Palestina sehingga realitas akan perdamaian semakin sulit untuk diwujudkan.

Dari pidatonya di Bar Ilan tersebut dapat dianalisa perspektif/pandangan yang menjadi haluan kebijakandan berpengaruh terhadap hubungan/perundingan damai dengan Palestina, antara lain:

1. Tanah Israel adalah hak bangsa Yahudi sehingga Israel dapat menentukan prasyarat untuk mencapai perdamaian.
2. Yerusalem tidak akan pernah dibagi.
3. Israel tidak akan mengizinkan kembalinya para pengungsi Palestina karena hal tersebut dapat mengancam eksistensi negara Yahudi.
4. Israel tidak akan bernegosiasi dengan Hamas.
5. Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi.⁷

Dengan pandangan seperti itu, Netanyahu tidak hanya menjauhkan Israel dari meja perundingan namun secara sepihak menutup celah negosiasi. Adanya konsep “security first” yang merefleksikan kebijakan pemerintahan Israel sejak 1967, diangkat Netanyahu dalam konteks menghadapi isu nuklir Iran dan Al-Qaeda yang sedang berkembang di kawasan Timur Tengah. Sedangkan Iran maupun Palestina saling berkaitan satu samalain terutama dengan munculnya gerakan militan anti Israel, sehingga apabila negara Palestina kelak berdiri, Netanyahu telah membatasinya dengan konsep demiliterisasi demi keamanan Israel. Barack Obama tidak bisa

⁷http://www.mideastweb.org/netanyahu_june_14_speech.htm

Acessed 21 March 2018

berdiam diri menyaksikan sikap defensif Netanyahu, terlebih dalam pidatonya di Kairo beberapa hari sebelum pidato Netanyahu di Bar Ilan, ia menyatakan komitmennya untuk mendukung negara Palestina merdeka serta meminta Israel untuk menghentikan aktivitas pemukiman yang selama ini menjadi ganjalan perdamaian. Obama terus mendesak Netanyahu untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menghidupkan proses damai dengan Palestina.

Pada 25 November 2009 di hadapan Cabinet Decision, Netanyahu akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan pemukiman, yang menurutnya merupakan keinginan terdalam Israel terhadap perdamaian. Netanyahu menyatakan bahwa langkah tersebut adalah keputusan yang sangat besar dan sulit demi meraih perdamaian, sehingga ia pun mengharapkan agar Palestina melakukan timbal balik. Hal tersebut sangat lumrah mengingat karakter Netanyahu dan koalisi sayap kanannya yang kontras dengan upaya damai, selain itu kebijakan moratorium menjadi kebijakan yang historis dalam pemerintahan Israel selama ini. Kebijakan moratorium pemukiman temporer tersebut berlangsung selama 10 bulan sejak November 2009 sampai September 2010 dan berlaku secara parsial, yaitu hanya di wilayah Tepi Barat dan tidak termasuk Yerusalem. Netanyahu kembali mengajukan seruannya kepada Palestina untuk menerima moratorium dan secepatnya menuju meja perundingan.

Hal tersebut disampaikan dalam pidato di Knesset Special Session sebulan setelah moratorium diumumkan, “internal cohesion is the most important thing that will allow us to achieve two tasks: defending ourselves against attacks on our right to self-defense and ensuring that the Palestinian Authority comes to the negotiating table”. Netanyahu juga menjabarkan masalah-masalah primer yang menjadi ancaman pertahanan Israel, seperti ancaman nuklir Iran, ancaman misil seperti roket dan bom dari para teroris serta laporan Goldstone. Richard Goldstone ialah utusan PBB yang membuat laporan dari hasil investigasi berupa data kegiatan

Israel seperti blokade, tembok pemisah dan pemukiman. Netanyahu menganggap bahwa laporan tersebut menjadi ancaman atas upaya defensif Israel.⁸

Namun Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak dapat berunding mengenai solusi tanpa menegosiasikan dua prinsip yang ia tawarkan di Bar Ilan sebelumnya, yaitu recognition dan demiliterasi, yang menjadi syarat fundamental. Israel memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan perundingan berdasarkan dua prinsip tersebut dan menurut Netanyahu Palestina belum juga merespons ajakan Israel untuk secepatnya berunding. Pada 9 Mei 2010 Netanyahu menyelesaikan tahap indirect proximity talks setelah Utusan Khusus George Mitchell berkunjung dan mendapat komitmen dari Netanyahu untuk melangkah ke proses damai selanjutnya. Mitchell menyatakan bahwa perdana menteri Israel tersebut setuju untuk menghentikan proyek pemukiman di Yerusalem Timur, sebagaimana yang diminta oleh pihak Palestina. Pada Agustus 2010, Amerika Serikat mengumumkan waktu perundingan langsung yang telah disepakati dan berlangsung dalam dua putaran, yaitu pada 2 September 2010 dan 14-15 September 2010. Netanyahu mendukung tenggat waktu satu tahun penyelesaian upaya damai yang ditentukan oleh Barack Obama.

Putaran pertama perundingan langsung 2 September 2010 dilakukan di Washington D.C. Proposal yang akan dibahas menjadi isu familiar, yaitu perbatasan 1948-1967 dengan kesepakatan pertukaran wilayah yang adil. Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa Palestina adalah “partner for peace” bagi Israel dan dengan yakin bahwa keduanya dapat mencapai kesepakatan historis. Namun fatalnya, ia membuka perundingan langsung secara defensif dengan menyatakan kembali dua prinsipnya kepada Palestina, yaitu konsep legitimacy dan security—adanya pengakuan dari Palestina terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan kesepakatan bahwa

⁸<http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2009/pages/pm-netanyahu-addresses-%20knesset-special-session-23-dec-2009.aspx> Accessed 21 March 2018

negara Palestina kelak merupakan negara yang aman bagi Israel. Netanyahu menegaskan bahwa dua prinsip tersebut merupakan “pilar perdamaian” dalam negosiasi damai dengan Palestina.⁹

Pada perundingan putaran kedua di Sharm El-Sheikh, Mesir, 14-15 September 2010, Netanyahu belum juga memberikan keputusan mengenai isu signifikan seperti perbatasan, pemukiman, pengungsi Palestina dan status Yerusalem. Ketika mendapat peringatan dari Palestina maupun Amerika Serikat mengenai moratorium yang hampir berakhir, Netanyahu bergeming dan mempertahankan kepentingan koalisi sayap kanannya yang pro-pemukiman. Ia menegaskan bahwa masalah pemukiman tidak ada kaitannya dengan perundingan damai.

Pada intinya, Netanyahu mencoba untuk mengelak dari kewajibannya mewujudkan negara Palestina dalam situasi apapun. Ketika perundingan langsung belum memberikan hasil dan berada pada current impasse seperti perundingan yang sudah-sudah, Netanyahu kembali menyodorkan prasyarat agar ia bersedia memperpanjang masa moratorium sehingga perundingan damai dapat berjalan. Bahkan secara khusus Netanyahu menyampaikannya di hadapan Knesset, yaitu apabila Palestina secara tegas mengakui Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi, ia dan kabinetnya siap untuk memperpanjang moratorium. Hal tersebut dilakukan Netanyahu untuk menghindari situasi buntu perundingan langsung akibat usainya kebijakan moratorium. Netanyahu bersikeras bahwa permintaan tersebut bukan sebagai prasyarat namun sebagai langkah meningkatkan kepercayaan (confidence building measure), terutama bagi rakyat Israel yang menurutnya kehilangan kepercayaan terhadap sikap Palestina akan perdamaian selama lebih dari 10 tahun. Ia juga menyatakan bahwa Israel siap memberikan konsesi, dan bahwa kesepakatan damai maupun negara Palestina merdeka

⁹<https://www.theguardian.com/world/2010/sep/02/binyamin-netanyahu-opens-middle-east-talks> Accessed 21 March 2018

akan tercapai jika rakyat Palestina berkenan memenuhi prasyarat tersebut.

"The Palestinians wasted 10 months and now they demand to continue the [settlement] freeze. I hope their demand isn't a ploy to avoid the concessions that must be made in order to achieve a peace deal." Jelas Netanyahu menghalangi setiap prasyarat dari Palestina, karena hampir semua isu di meja perundingan telah diblokade olehnya. Namun pada kenyataannya, Netanyahu sendirilah yang mengutamakan prasyarat dan kepentingan koalisi sayap kanannya dalam negosiasi damai dengan Palestina.¹⁰

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai agresi Israel ke Palestina perlu kiranya di ketahui terlebih dahulu mengapa konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang terus berlanjut dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teologis dan historis. Persoalan Palestina mencuat menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat runtuhnya Ottoman Empire Turkey. Palestina akhirnya berada diantara negara-negara Arab eks Ottoman Turkey yang berada di bawah administrasi Inggris. Hal ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa.

Sesungguhnya mandat ini di-adopsi dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang isinya menyuarakan dukungan untuk pendirian suatu negara di tanah air Palestina untuk orang Yahudi. Berangkat dari semangat Deklarasi Balfour komunitas Yahudi yang menyebar diseluruh dunia bertekad untuk mendirikan negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. Secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai tanah yang dijanjikan tuhan (*promised land*) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak jaman Umar bin khatab.¹¹

¹⁰<https://www.haaretz.com/1.5123960> Accessed 21 March 2018

¹¹<https://www.merdeka.com/politik/negara-negara-arab-harus-bersatu-lawan-agresi-israel-c7hr1ru.html> Accessed 22 March 2018

C. Kekerasan Israel

Pada tanggal 8 Desember 1987, di mana sebuah kendaraan Israel yang dengan sengaja melindas sebuah mobil yang membawa empat pekerja Palestina di kamp pengungsi Jabalya, di Jalur Gaza utara. Akibatnya empat orang Palestina itu terbunuh, sehingga membuat rakyat Palestina dengan spontan marah dengan cepat menyebar melintasi tepi Barat. Ketegangan ini sudah meluap sebelum pecahnya demonstrasi, yang didukung oleh iklim politik yang buruk. Selain pengambil alihan lahan secara terus menerus yang dilakukan oleh Israel membuat rakyat untuk melakukan Intifadhah. Israel memiliki kontrol penuh atas pembangunan sosial, ekonomi dan politik Palestina. Hingga kemudian muncul Intifadah enam tahun ditandai oleh mobilisasi dan demonstrasi massa yang populer. Sejak meletusnya gerakan Intifadhah pertama pada tanggal 8 Desember 1987, Hamas selalu menyerukan untuk terus melancarkan perlawanan terhadap kesewenang-wenang Israel. Hamas menganggap Intifadhah adalah cara jihad yang dapat mengantarkan pada tujuan utama, yakni membebaskan negeri Palestina dari cengkraman kezaliman Yahudi-Israel. Bersama-sama dengan gerakan radikal lain seperti Jihad Islam, Hamas terus melancarkan gerakan Intifadhah terhadap Israel.

Maret 2000, Kunjungan pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa memicu kerusuhan. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu tempat suci umat Islam. Intifadah gelombang kedua pun dimulai. Intifadhah II sejak 28 September 2000-28 September 2001 (1 tahun) terbilang jauh lebih berdarah dari Intifadhah yang pertama. Saat warga Palestina melakukan serangkaian demonstrasi, militer Israel merespon dengan cara menembaki warga Palestina. Peristiwa Intifadhah II menimbulkan korban syahid 727 orang (anak-anak 159 orang), luka-luka 30.000 orang (Tarbawi edisi 31 Th. 3/Muharram 1423 H/29 Maret 2002). Pada tahun 1997, 1600 orang Palestina dipenjara, 700 orangnya tanpa proses (Tarbawi edisi 31 Th. 3/Muharram 1423 H/29 Maret 2002). Selama 2003, sedikitnya 72 operasi pembunuhan digelar Israel

Maret-April 2002 Israel membangun Tembok Pertahanan di Tepi Barat dan diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina. Secara umum, aksi ini disebut “bom bunuh diri” sebagai akumulasi dari rasa frustrasi. Sebutan ini tidaklah tepat jika dilihat dari sisi pandang Hamas sebagai pelaku. Bagi Hamas, aksi ini adalah bagian dari jihad yang pelakunya memperoleh kematian mulia (syahid). Aksi ini juga tidak dapat dikatakan sebagai akumulasi rasa frustrasi karena para pelakunya bukan sembarang orang. Dan ini adalah merupakan strategi yang Hamas gunakan dalam melawan Israel.

Januari-Juli 2008 terjadi ketegangan yang meningkat di Gaza. Israel mulai memutus suplai listrik dan gas terhadap Palestina. Dunia melihat bahwa Hamas tak berhasil mengendalikan tindak kekerasannya. PM Palestina Ismail Haniyeh bersih keras tak akan tunduk pada Israel karena tidak ingin Palestina selalu mendapat tekanan dari Israel. Sehingga pada bulan November 2008 Hamas memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pertemuan unifikasi Palestina yang diadakan di Kairo, Mesir. Hamas melakukan serangan roket kecil berjatuhan di wilayah Israel. Serangan Israel kembali dimulai ke Gaza dimulai 26 Desember 2008. Israel mulai melancarkan Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-pusat operasi Hamas. Korban dari warga sipil yang tidak bersalah banyak menjadi korban.

Dengan adanya berbagai serangan yang dilakukan Israel tidak membuat Hamas mengalah. Perbaikan strategi oleh Hamas terus dilakukan sehingga Hamas dapat selalu bertahan untuk menghadapi kekerasan Israel. Adapun kelemahan-kelemahan Hamas menjadikan Hamas selalu mencari strategi terbaiknya untuk selalu bertahan dan adapun strateginya akan dibahas di bab selanjutnya.